Sociale : Journal of Social and Political Sciences
Vol. 2, No. 1, June 2026
e-ISSN: 3110-5637 (online)
https://jurnal.sinesia.id/index.php/sociale

Manchild dan Representasi Maskulinitas dalam Kepemimpinan Politik

Manchild and the Representation of Masculinity in Political Leadership

Alma Shafuramah[1], Fadia Rosa Amalia[2], Ika Arinia Indriyany[3]
E-mail Korespondensi : 6670230050@untirta.ac.id
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article
|Submitted: 16 March 2026 **|Revised**: 29 May 2026 **|Accepted**: 30 May 2026
|Published: 30 May 2026
How to cite: Alma Shafuramah, etc., "Manchild dan Representasi Maskulinitas dalam Kepemimpinan Politik", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 1, 2026, p. 253-266.

ABSTRACT

The behavior of political leaders in the public sphere influences how society evaluates leadership quality. In recent years, the term manchild has been used to describe adult men who show emotional or defensive responses when facing criticism. This study aims to analyze the phenomenon of manchild in contemporary politics by examining its relation to patriarchy, hegemonic masculinity, and political communication. This research uses a qualitative approach with a literature review method. Data were obtained from relevant books, scientific journals, and articles, then analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the manchild phenomenon in politics is not only related to the personal character of political leaders, but is also influenced by patriarchal structures and hegemonic masculinity that shape expectations of male leadership. The "foreign stooges" narrative in political speeches shows that responses to criticism can function as a political communication strategy as well as an effort to maintain leadership image in the public sphere

Keyword: *manchild; hegemonic masculinity; patriarchy; political leadership*

ABSTRAK

Perilaku pemimpin politik di ruang publik memengaruhi cara masyarakat menilai kualitas kepemimpinan. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *manchild* digunakan untuk menggambarkan laki-laki dewasa yang menunjukkan respons emosional atau defensif saat menghadapi kritik. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *manchild* dalam politik kontemporer dengan melihat keterkaitannya dengan patriarki, maskulinitas hegemonik, dan komunikasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *manchild* dalam politik tidak hanya berkaitan dengan karakter personal pemimpin, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur patriarki dan maskulinitas hegemonik yang membentuk ekspektasi terhadap kepemimpinan laki-laki. Narasi "Antek asing" dalam pidato politik menunjukkan bahwa respons terhadap kritik dapat menjadi strategi komunikasi politik pidato politik sekaligus upaya mempertahankan citra kepemimpinan di ruang publik.

Kata Kunci: *manchild; maskulinitas hegemonik; patriarki; kepemimpinan politik*

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, dinamika politik semakin dipengaruhi oleh perkembangan media digital dan media sosial yang membuat komunikasi politik menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Tokoh politik tidak lagi hanya dinilai dari kebijakan yang mereka hasilkan, tetapi juga dari bagaimana mereka berkomunikasi, merespons kritik, serta

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

menampilkan sikap dan perilaku di ruang publik (Latuperissa, 2022). Setiap pernyataan, reaksi, maupun gestur politik dapat dengan cepat menjadi perbincangan publik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik di era kontemporer tidak hanya berkaitan dengan kapasitas institusional, tetapi juga berkaitan dengan cara seorang pemimpin membangun citra diri serta menunjukkan kematangan emosional dalam menghadapi tekanan politik (Nugroho & Pratama, 2024).

Berdasarkan diskursus publik yang berkembang di media, muncul berbagai istilah yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan perilaku pemimpin politik. Salah satu istilah yang cukup sering digunakan adalah *manchild*, yaitu istilah yang merujuk pada laki-laki dewasa yang dianggap menunjukkan perilaku kekanak-kanakan dalam situasi tertentu. Dalam politik, istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku pemimpin yang cenderung defensif terhadap kritik, mudah tersinggung terhadap perbedaan pendapat, atau lebih menonjolkan respons emosional dibandingkan pendekatan rasional dalam menghadapi persoalan politik (Nurhadi, 2022). Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena dalam sistem politik demokratis, pemimpin diharapkan mampu mengelola konflik secara rasional serta membuka ruang dialog terhadap kritik publik. Namun dalam praktiknya, respon terhadap kritik sering kali tidak selalu dilakukan melalui diskusi substansi kebijakan, tetapi dapat berubah menjadi respons emosional atau konfrontatif yang justru memperlihatkan dinamika lain dalam praktik kepemimpinan politik.

Fenomena ini dapat diamati melalui pernyataan politik Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Dalam beberapa kesempatan, kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah direspons dengan narasi yang mempertanyakan motif para pengkritik, misalnya dengan menyebut bahwa pihak yang terus mengkritik kebijakan tertentu merupakan "antek-antek asing." Narasi ini menjadi salah satu data utama dalam penelitian ini, karena narasi tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum publik dan dapat dikonfirmasi melalui pemberitaan media (Tempo, 2026). Respons semacam ini menunjukkan bagaimana kritik terhadap kebijakan publik tidak selalu dijawab melalui substansi kebijakan, tetapi dialihkan menjadi narasi mengenai loyalitas terhadap negara. Situasi ini menunjukkan bahwa respons pemimpin terhadap kritik tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, tetapi juga oleh faktor simbolik dan emosional yang berkaitan dengan citra kepemimpinan di hadapan publik (Roniansyah et al., 2022).

Melalui fenomena ini, dapat dilihat bahwa perilaku pemimpin dalam politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan karakter individual. Cara seorang pemimpin menanggapi kritik, mempertahankan legitimasi, serta membangun citra kepemimpinan juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai kepemimpinan dan maskulinitas dalam masyarakat. Secara historis, politik sering dipandang sebagai ruang yang didominasi oleh laki-laki, sehingga standar kepemimpinan sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai maskulin seperti kekuatan, dominasi, ketegasan, serta kemampuan menunjukkan otoritas. Asbari (2024) menjelaskan bahwa dalam budaya politik seperti ini, pemimpin laki-laki sering berada dalam tekanan untuk mempertahankan citra sebagai figur yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh kritik. Tekanan tersebut dapat mendorong munculnya sikap defensif atau konfrontatif ketika seorang pemimpin menghadapi kritik, karena kritik tersebut dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap otoritas atau legitimasi kepemimpinannya di hadapan publik.

Penelitian ini menggunakan perspektif patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby (1990) yang menjelaskan bahwa patriarki merupakan suatu sistem sosial yang memungkinkan laki-laki mempertahankan posisi dominan melalui berbagai struktur sosial yang saling berkaitan, seperti institusi negara, budaya, serta relasi sosial dalam masyarakat. Dalam sistem sosial yang dipengaruhi oleh patriarki, laki-laki sering kali dipandang sebagai figur yang lebih legitim untuk memegang kekuasaan dalam ruang publik, termasuk dalam institusi politik. Struktur sosial tersebut kemudian membentuk norma mengenai bagaimana laki- laki seharusnya berperilaku ketika berada dalam posisi kepemimpinan, terutama dalam hal menunjukkan otoritas dan mempertahankan dominasi dalam relasi kekuasaan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif patriarki dari Sylvia Walby (1990) yang menjelaskan bahwa patriarki merupakan sistem sosial di mana laki-laki mempertahankan posisi dominan melalui berbagai struktur sosial yang saling berkaitan, seperti institusi negara, budaya, dan relasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep maskulinitas hegemonik yang dikembangkan Raewyn Connell (1982), yang menjelaskan bahwa maskulinitas hegemonik merupakan bentuk maskulinitas yang dianggap paling ideal dan dominan dalam suatu masyarakat—menekankan sifat kuat, kompetitif, dominan, dan otoritatif. Dalam politik, kedua kerangka ini membantu menjelaskan mengapa respons emosional terhadap kritik dapat muncul sebagai bagian dari upaya mempertahankan citra kepemimpinan yang dianggap kuat.

Penelitian terdahulu mengenai maskulinitas dalam kepemimpinan politik di Indonesia telah membahas konstruksi citra maskulin melalui branding politik (Asbari et al., 2024), serta penggunaan retorika populis dalam kontestasi politik (Deha, 2021). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dominasi kekuasaan laki-laki secara umum, dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana perilaku pemimpin yang bersifat defensif atau emosional dalam merespons kritik dapat dipahami dalam kerangka maskulinitas hegemonik. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji fenomena *manchild* secara spesifik dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto, menggunakan narasi "antek asing" sebagai unit analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik dalam memahami hubungan antara gender, maskulinitas, dan praktik kepemimpinan politik dalam demokrasi kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell (2009), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami serta menafsirkan makna dari suatu fenomena sosial secara mendalam. Metode ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman konseptual mengenai fenomena *manchild* dalam perspektif maskulinitas hegemonik dalam politik kontemporer.

Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review), yaitu dengan menelaah berbagai sumber akademik untuk membangun kerangka konsep penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah narasi pidato Prabowo Subianto terkait isu ‘antek asing’ sebagai representasi konstruksi kepemimpinan politik. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan membandingkan konsep yang berkaitan dengan maskulinitas hegemonik, patriarki, serta dinamika gender dalam politik. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media, yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles (2014). Model analisis ini meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui berbagai tahapan tersebut, berbagai literatur yang relevan dianalisis untuk melihat keterkaitan antara konsep dan memahami fenomena *manchild* sebagai bagian dari konstruksi maskulinitas hegemonik dalam politik kontemporer.

Hasil dan pembahasan

Melalui kerangka teori patriarki publik dari Sylvia Walby serta konsep maskulinitas hegemonik dari Raewyn Connell , fenomena *manchild* tidak hanya dipahami sebagai karakter personal seorang aktor politik, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang terbentuk melalui struktur kekuasaan, praktik komunikasi politik, serta respons masyarakat terhadap perilaku pemimpin di ruang publik. Bagian ini akan menguraikan empat aspek utama, yaitu konstruksi sosial fenomena *manchild* dalam politik kontemporer, peran patriarki publik dalam menormalisasi perilaku dominan di ruang politik, praktik *manchild* sebagai bentuk performa

politik, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan politik.

1.1 Konstruksi Sosial *Manchild* dalam Politik Kontemporer

Data pertama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pidato dan pernyataan politik Prabowo Subianto yang dilaporkan media nasional. Berdasarkan pemberitaan Tempo (2026), Prabowo menyebut sejumlah pihak sebagai "antek asing" dalam konteks merespons kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dan direkam dalam forum publik, sehingga dapat dijadikan data yang dapat diverifikasi. Selain itu, narasi serupa juga ditemukan beredar di media sosial, di mana label "antek asing" digunakan untuk mendelegitimasi kelompok-kelompok kritis, seperti organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data tersebut, fenomena manchild dalam kepemimpinan Prabowo dapat dipahami melalui perspektif patriarki Sylvia Walby (1990). Ruang politik merupakan salah satu arena di mana laki-laki secara historis menempati posisi dominan dalam struktur kekuasaan. Dominasi tersebut membentuk norma sosial mengenai cara pemimpin laki-laki bersikap ketika menghadapi kritik atau konflik politik. Pemimpin laki-laki sering berada dalam tekanan untuk mempertahankan otoritas serta menunjukkan kontrol terhadap situasi politik (I Gde Eka Sukarma Putra & Soeling, 2024). Ketika kritik dianggap mengancam legitimasi kepemimpinan, respons defensif atau emosional dapat muncul sebagai upaya mempertahankan posisi dominan tersebut.

Konsep maskulinitas hegemonik Raewyn Connell (1982) membantu menjelaskan bagaimana perilaku tersebut diproduksi dalam praktik kepemimpinan Prabowo. Maskulinitas hegemonik menempatkan bentuk maskulinitas tertentu sebagai standar ideal dalam masyarakat, yaitu maskulinitas yang kuat, dominan, kompetitif, serta tidak menunjukkan kelemahan. Dalam kerangka ini, penggunaan narasi "antek asing" dalam

merespons kritik dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan citra maskulinitas yang dominan di hadapan publik. Perilaku yang kemudian dilabeli manchild ini tidak hanya berkaitan dengan karakter individu Prabowo, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang membentuk cara laki-laki mempertahankan kekuasaan dalam sistem politik (Nasution & Hidayat, 2024).

Konstruksi sosial manchild muncul ketika perilaku mempertahankan otoritas tersebut dipersepsikan secara berbeda oleh masyarakat. Respons defensif dapat dimaksudkan sebagai bentuk ketegasan dalam kepemimpinan. Namun, sebagian masyarakat menafsirkan respons tersebut sebagai sikap emosional yang tidak mencerminkan kedewasaan politik. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan untuk mempertahankan maskulinitas dominan dengan harapan publik terhadap kepemimpinan yang lebih rasional dan terbuka terhadap kritik.

1.2 Patriarki Publik dan Normalisasi Perilaku Dominan

Ruang politik modern pada dasarnya tidak sepenuhnya netral, melainkan masih dipengaruhi oleh struktur patriarki publik yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam institusi politik. Kondisi ini turut membentuk standar kepemimpinan politik yang telah dibahas sebelumnya, di mana figur pemimpin ideal sering diasosiasikan dengan karakter maskulin seperti kekuatan, ketegasan, serta kemampuan untuk mendominasi lawan politik. Dengan demikian, standar kepemimpinan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan hasil produk dari struktur sosial yang luas.

Patriarki tidak hanya beroperasi dalam ranah domestik, tetapi juga melalui institusi negara, kebijakan publik, serta produksi wacana di ruang publik (Walby, 1990). Dalam konteks ini, praktik politik sering kali memproduksi nilai-nilai maskulinitas tertentu yang dianggap legitim untuk memegang kekuasaan. Kondisi tersebut juga sejalan dengan konsep maskulinitas hegemonik yang diperkenalkan oleh Raewyn Connell (1982). Connell menjelaskan bahwa maskulinitas hegemonik merupakan bentuk maskulinitas yang dipandang paling sah dan dominan dalam struktur sosial. Dalam praktik politik, bentuk maskulinitas ini kerap direpresentasikan melalui gaya komunikasi yang konfrontatif, retorika yang menekankan ancaman terhadap negara, serta klaim sebagai pelindung nasional.

Konstruksi maskulinitas dalam politik indonesia dapat dilihat dalam retorika pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait narasi "antek- antek asing". Dalam pidatonya, ia menyampaikan peringatan kepada

masyarakat untuk mewaspadai kekuatan asing yang dianggap berupaya memengaruhi opini publik melalui lembaga swadaya masyarakat maupun media massa. Retorika ini membangun dikotomi antar aktor politik yang diposisikan sebagai pembela kepentingan nasional dan pihak lain yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Pemberitaan dari Tempo (2026) menunjukkan bahwa istilah 'antek asing' tidak hanya muncul dalam pidato politik, tetapi juga beredar dalam diskursus publik. Label tersebut kerap diarahkan kepada kelompok kritis, seperti organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa. Dalam dinamika pembahasan revisi Undang- Undang Tentara Nasional Indonesia, misalnya, kelompok masyarakat sipil yang melakukan aksi protes juga sempat dilabeli "antek asing" oleh sejumlah akun media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana retorika politik dapat berfungsi sebagai mekanisme delegitimasi terhadap aktor-aktor kritis di ruang publik.

Selain beredar dalam wacana politik formal, narasi "antek asing" juga memperoleh resonansi dalam ruang diskusi publik di media sosial. Berdasarkan pengamatan pada kolom komentar platform Tiktok pada unggahan yang membahas video tersebut, masyarakat tak sedikit yang menanggapi retorika tersebut dengan memberikan dukungan pembenaran, misalnya melalui komentar yang menyatakan bahwa peringatan terhadap "antek asing" dianggap sebagai bentuk ketegasan pemimpin dalam melindungi kepentingan nasional. Respons semacam ini menujukkan bahwa retorika konfrontatif tidak selalu dipersepsikan secara negatif, melainkan dalam beberapa kasus justru dipandang sebagai karakter pemimpin yang tegas dan berani (Deha, 2021).

1.3 Manchild sebagai Performa Politik

Dalam kajian gender dan politik, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi formal dalam struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang ditampilkan diruang publik. Cara seorang pemimpin berbicara, mengekspresikan emosi, serta berinteraksi dengan masyarakat menjadi bagian dari konstruksi citra kepemimpinan yang membentuk persepsi publik (Pratiwi, 2024). Dalam hal ini, ekspresi maskulinitas dalam politik tidak semata-mata mencerminkan identitas personal pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial yang mengatur bagaimana laki-laki menampilkan otoritas dan kekuasaan di ruang publik.

Dalam praktik politik kontemporer, gaya komunikasi seorang pemimpin sering kali memanfaatkan ekspresi emosional yang kuat untuk

menarik perhatian publik dan memperkuat pesan politik yang disampaikan. Ekspresi kemarahan, kritik keras, maupun retorika yang konfrontatif dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan untuk menampilkan citra kepemimpinan yang tegas dan berani. Dalam kerangka ini, perilaku yang dalam wacana populer sering digambarkan sebagai *manchild* tidak selalu dipersepsikan semata-mata sebagai bentuk ketidakmatangan emosional, tetapi juga dapat dipahami sebagai bagian dari performa politik yang digunakan untuk membangun otoritas simbolik di hadapan publik.

Kasus penggunaan narasi "antek asing" dalam pidato politik yang telah dibahas sebelumnya dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Retorika yang bersifat antagonistik dan emosional tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap pihak tertentu, tetapi juga sebagai cara untuk membangun batas simbolik antara kelompok "nasional" dan pihak yang diposisikan sebagai lawan politik. Melalui penggunaan bahasa yang kuat dan provokatif, pemimpin politik dapat menciptakan narasi konflik yang memudahkan publik untuk mengidentifikasi posisi politik tertentu. Dalam situasi ini, ekspresi emosional menjadi bagian drai strategi komunikasi yang bertujuan memperkuat mobilisasi dukungan sekaligus menegaskan citra kepemimpinan yang dianggap berpihak pada kepentingan nasional.

Gaya komunikasi semacam ini juga berkaitan dengan performa politik yang menekankan kedekatan emosional antara pemimpin dan masyarakat. Dalam kajian komunikasi politik, gaya retorika yang dramatis dan konfrontatif sering digunakan untuk membangun kesan spontanitas dan keberanian dalam menyuarakan kepentingan publik (Moffitt, 2016). Dengan menampilkan emosi secara terbuka, pemimpin dapat memposisikan dirinya sebagai figur yang dianggap lebih autentik dan berani dibandingkan dengan aktor politik yang tampil lebih formal atau teknokratis.

Perkembangan media digital juga semakin memperkuat dinamika tersebut. Potongan pidato, ekspresi wajah, maupun gestur pemimpin politik dapat dengan cepat tersebar melalui media sosial dan menjadi bagian dari diskursus publik yang lebih luas. Dalam konteks komunikasi politik digital, gaya komunikasi yang dramatis atau emosional sering kali lebih mudah menarik perhatian publik serta menghasilkan tingkat keterlibatan yang tinggi di media sosial (Engesser et al., 2017). Akibatnya, performa politik seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari substansi kebijakan yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana ekspresi dan gaya komunikasinya diproduksi serta direproduksi dalam ruang publik digital.

Dengan demikian, fenomena *manchild* dalam politik dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika performa kepemimpinan dalam komunikasi politik kontemporer. Sukmana (2024) menjelaskan bahwa

perilaku yang tampak impulsif atau emosional tidak selalu berdiri sebagai karakter personal semata, melainkan juga berkaitan dengan strategi komunikasi politik yang memanfaatkan emosi publik untuk membangun citra kepemimpinan dan memperkuat dukungan politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa performa komunikasi seorang pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk dinamika politik di ruang publik. Ekspresi emosional, retorika konfrontatif, serta gaya komunikasi yang dramatis tidak hanya mempengaruhi cara pesan politik disampaikan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat akan menafsirkan karakter dan kapasitas kepemimpinan seorang aktor politik. Dalam konteks ini, performa politik yang menampilkan ekspresi emosional tertentu dapat menghasilkan beragam respons dari publik, mulai dari dukungan yang semakin kuat hingga munculnya kritik terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu impulsif. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana fenomena manchild dalam komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai strategi retorika, tetapi juga berimplikasi pada pembentukan persepsi masyarakat terhadap figur pemimpin politik di ruang publik.

1.4 Dampak Fenomena Manchild terhadap Persepsi Masyarakat

Munculnya fenomena *manchild* dalam politik kontemporer berpengaruh terhadap cara masyarakat menilai kualitas kepemimpinan. Persepsi publik tidak hanya dibentuk oleh kebijakan atau kinerja administratif seorang pemimpin, tetapi juga oleh perilaku dan gaya komunikasi politik yang ditampilkan di ruang publik. Ketika seorang pemimpin menunjukkan respons yang dianggap emosional, defensif, atau cenderung menyalahkan pihak lain dalam menghadapi kritik, sebagian masyarakat dapat menafsirkan perilaku tersebut sebagai bentuk ketidakmatangan politik. Persepsi ini kemudian berkembang menjadi label sosial yang digunakan untuk menilai karakter kepemimpinan (Ahmad, 2022). Dalam konteks demokrasi modern, persepsi masyarakat memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin serta legitimasi politik yang dimilikinya.

Penelitian mengenai maskulinitas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku laki-laki sangat dipengaruhi norma sosial mengenai maskulinitas (Putri, 2022). Penelitian Syahfitri dan Mawangir (2024) mengenai toxic masculinity pada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menunjukkan bahwa laki-laki sering didorong untuk mempertahankan citra maskulin tertentu—seperti dominasi dan penghindaran sikap yang dianggap

lemah. Norma sosial ini membentuk cara individu berperilaku di ruang publik sekaligus memengaruhi bagaimana perilaku tersebut ditafsirkan masyarakat. Dalam politik, tekanan untuk mempertahankan citra maskulinitas dapat membuat pemimpin cenderung menampilkan sikap defensif atau konfrontatif ketika menghadapi kritik. Namun, ketika perilaku tersebut dipersepsikan berlebihan oleh publik, citra kepemimpinan justru dapat berubah menjadi negatif karena dianggap tidak mencerminkan kedewasaan politik. Selain itu, budaya patriarki yang kuat sering kali menempatkan laki-laki dalam posisi untuk terus menunjukkan kekuatan dan kontrol. Ketika norma tersebut diterapkan dalam ruang politik, perilaku yang dimaksudkan untuk mempertahankan otoritas dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda di mata publik. Sebagian masyarakat mungkin melihatnya sebagai bentuk ketegasan, sementara yang lain menafsirkannya sebagai sikap yang kurang dewasa secara emosional. Ridwan dan Safitri (2025) menemukan bahwa polarisasi persepsi semacam ini dalam kepemimpinan politik Indonesia cenderung menguat ketika pemimpin menggunakan retorika yang bersifat konfrontatif dan mengesampingkan diskursus kebijakan substantif.

Dampak lain dari fenomena *manchild* adalah munculnya polarisasi opini di ruang publik. Dalam era media digital, pernyataan atau tindakan pemimpin dapat dengan cepat menjadi bahan diskusi dan perdebatan di berbagai platform (Abhipraya et al., 2020). Situasi ini membuat masyarakat lebih aktif dalam memberikan penilaian terhadap karakter kepemimpinan tokoh politik, termasuk tokoh seperti Prabowo Subianto yang sering menjadi bagian dari diskursus politik nasional. Ketika sebuah pernyataan politik dianggap menunjukkan sikap defensif atau menyalahkan pihak lain, sebagian masyarakat dapat memaknainya sebagai bentuk ketidaksiapan menerima kritik, sementara kelompok pendukung mungkin tetap melihatnya sebagai bentuk ketegasan kepemimpinan. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa fenomena *manchild* tidak hanya berdampak pada citra individu pemimpin, tetapi juga mempengaruhi dinamika opini publik dalam ruang demokrasi.

Fenomena *manchild* memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan politik. Label tersebut menjadi bagian dari mekanisme penilaian sosial yang digunakan publik untuk mengevaluasi perilaku pemimpin di ruang politik. Dalam demokrasi, persepsi publik yang terbentuk melalui diskursus sosial dapat mempengaruhi legitimasi politik serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepemimpinan. Oleh karena itu, fenomena ini

menunjukkan bahwa perilaku dan komunikasi politik pemimpin tidak hanya memiliki konsekuensi simbolik, tetapi juga dapat berdampak langsung pada cara masyarakat menilai kualitas kepemimpinan dalam sistem politik kontemporer.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *manchild* dalam politik kontemporer tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan karakter pribadi seorang pemimpin. Perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarki yang masih kuat dalam ruang politik, yang membentuk ekspektasi bahwa pemimpin laki-laki harus tampil tegas, dominan, dan mampu mempertahankan otoritas di hadapan publik.

Kasus penggunaan narasi "antek asing" dalam pidato politik menjadi salah satu contoh bagaimana respons terhadap kritik dapat dimaknai dalam kerangka maskulinitas hegemonik. Retorika tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembelaan terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai cara untuk menegaskan posisi kepemimpinan serta membangun batas simbolik antara pihak yang dianggap membela kepentingan nasional dan pihak yang dipersepsikan sebagai lawan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang dilabeli sebagai *manchild* dalam politik tidak dapat dilepaskan dari struktur patriarki dan konstruksi maskulinitas yang membentuk praktik kepemimpinan di ruang publik. Demikian, respons politik seperti penggunaan narasi "antek asing" tidak hanya dapat dipahami sebagai strategi komunikasi politik, tetapi juga sebagai bagian dari praktik maskulinitas yang diproduksi dan dipertahankan dalam struktur kekuasaan politik.

Saran

Fenomena *manchild* dalam politik kontemporer menunjukkan pentingnya kedewasaan emosional dan keterbukaan terhadap kritik dalam praktik kepemimpinan politik di ruang publik. Oleh karena itu, aktor politik diharapkan dapat mengembangkan gaya komunikasi yang lebih rasional, dan berorientasi pada substansi kebijakan agar perdebatan politik tidak hanya didominasi oleh retorika yang bersifat konfrontatif. Di sisi lain, masyarakat juga harus mampu bersikap lebih kritis dalam menafsirkan narasi politik yang beredar di media digital, sehingga diskursus politik dapat berkembang secara lebih sehat.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih dan rasa syukur penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini, baik melalui masukan, diskusi, maupun dukungan akademik sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Abhipraya, F. A., Vidayat, N. A., & Pamungkas, W. A. (2020). Mencermati Populisme Pemimpin Lokal Sebagai Upaya Membangun Citra Ditengah Pandemi Covid-19. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, *3*(2), 040. https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1119

Ahmad, N. (2022). Persepsi Publik, Kapasitas Personal dan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Mengatasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikatif*, *11*(2), 118–136. https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4278

Asbari, W. T., Suwiknyo, E. S., Saptawan, E. K. S., & Hosen, M. Z. A. H. (2024). Dalam Bayang-bayang Maskulinitas: Studi Kasus Branding Politik Prabowo Subianto. *Jurnal Komunikasi Profesional*, *7*(4), 644–660. https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.7764

Ayuni Indah Syahfitri, & Muh. Mawangir. (2024). Fenomena Toxic Masculinity di Masyarakat dari Persepsi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. *Indonesian Journal of Behavioral Studies*, *4*(2), 105–116. https://doi.org/10.19109/ijobs.v4i2.24673

Connell, R. (2005). *Masculinities*. University of California Press.

Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.)*. Sage Publications.

Deha, D. (2021). Retorika Populisme Dalam Kontestasi Politik Di Indonesia. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *18*(1), 1–13. https://doi.org/10.36451/jisip.v18i1.45

Engesser, S., Ernst, N., Esser, F., & Büchel, F. (2017). Populism and social media: how politicians spread a fragmented ideology. *Information, Communication & Society*, *20*(8), 1109 1126. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697

Putra, I Gde Eka Sukarma & Soeling, P. D. (2024). Tren Riset Tentang Kepemimpinan pada Jurnal Administrasi di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, *5*(3), 676–687. https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.2060

Latuperissa, A. A. A. (2022). Pendekatan Public Relations Politik di Media Sosial dalam Pembentukan Citra Politik. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, *3*(1),

9–17. https://doi.org/10.31294/jpr.v3i1.1015

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3/E*. Sage Publications.

Moffitt, B. (2016). *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation.*

Nasution, H., & Hidayat, M. (2024). Patriarki dan Kekuasaan: Analisis Konstruksi Gender dalam Kepemimpinan Politik Kontemporer Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 13(2), 210–225.

Nurhadi, T. (2022). MOTIF WACANA "JANGAN SAMPAI INDONESIA JATUH KE TANGAN PEMBOHONG": STUDI DARI SEGI ANALISIS WACANA KEBIJAKAN KRITIS. *Buana Bastra*, *8*(2), 50–61.https://doi.org/10.36456/bastra.vol8.no2.a5136

Nugroho, B., & Pratama, D. (2024). Kepemimpinan Digital dan Persepsi Publik di Era Media Sosial: Studi terhadap Pemimpin Politik Indonesia. Jurnal Komunikasi Indonesia, 13(1), 33–48.

Pratiwi, F. N. (2024). PENGGUNAAN BAHASA JAWA DAN SIMBOL IDENTITAS POLITIK GANJAR PRANOWO DI MEDIA SOSIAL. *Linguistik Indonesia*, *42*(1), 157–183. https://doi.org/10.26499/li.v42i1.543

Putri, S. V. (2022). Representasi Makna Maskulinitas Iklan MSGlow For Men: Analisis Multimodal Kress dan Van Leeuwen. *Avant Garde*, *10*(2), 177. https://doi.org/10.36080/ag.v10i2.1930

Roniansyah, R., Nuriqli, P. Q. A., & Hayat, M. A. (2022). Komunikasi Politik Polri dalam Menghadapi Kritik Melalui Bhayangkara Mural Festival 2021. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(1), 70. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5658

Ridwan, A., & Safitri, R. (2025). Polarisasi Opini Publik dalam Kepemimpinan Konfrontatif: Analisis Wacana Media Sosial di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan HAM, 8(1), 15–30.

Safitri, D. (2020). ANALISIS DEMOKRASI HABERMAS PADA TEKS FORUM DISKUSI ONLINE RUU OMNIBUS LAW. *JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, *4*(01), 1–13. https://doi.org/10.32534/jike.v4i01.1099

Sukmana, O., Komalawati, E., & Yuliasari, I. (2024). Gaya Komunikasi Publik Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *6*(2), 291–304. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3608

Tempo.co. (2026). Antek Asing di Pemerintahan Prabowo. https://www.tempo.co/investigasi/antek-asing-pemerintahan-prabowo-2116694

Walby, S. (1990). *1990 Walby Theorising Patriarchy book Blackwell*.